

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhar Kasim. 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bagir Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Almani.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. cet. Ke 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Jimlly Ashiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Paimin Napitulu. 2006. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Patuan Sinaga. 2001. *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Philipus M. Hadjon. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: UNAIR.
- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozali Abdullah. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ryaas Rasyid. 2007. *Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa depannya*. Jakarta: LIPI Press.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

- Siswanto Sunarto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Jakarta: Depdiknas.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Bandar Lampung. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
- Kota Jambi. *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 12).
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Madiun. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Jurnal/Artikel

Anik Tri Haryani dkk, "Legalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi Usaha Lapak Jual Beli Emas Di Kota Madiun", Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1, Maret, Universitas Merdeka, Madiun, 2018.

Akhmad Diannor dkk, "Kedudukan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)", Jurnal Fakultas hukum Universitas islam Kalimantan MAB.

Anonim, *Bab II Tinjauan Pustaka*, <http://sc.syekhnurjati.ac.id>, tanggal akses 8 Desember 2020.

Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogya Karta Nomor 26 Tahun 2002," Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Elfi Indra, *Asas-Asas Pemerintahan Daerah*, "<http://elfi-indra.com/2011/06>, diakses tanggal 16 Juni 2019.

Erizka Permatasari, "Mengetahui Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengetahui-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, tanggal akses 23 Oktober 2022.

Furqon dan Ria Fitri, "Pengaturan Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 3 (1) Februari 2019, Pp. 24-31, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2019.

<https://www.google.com/amp/s/persbhayangkara.id/2019/10/24/tim-terpadu-tertibkan-pkl-dipasar-simpang-pulai-kota-jambi/amp/>. Diakses pada tanggal 15 September 2022.

Ipang, *Penyebab Banyaknya Pedagang kaki lima (PKL)*, www. Yahoo answer, diakses tanggal 12 September 2022.

Kausar AS, *Memantapkan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah*, Depdagri Republik Indonesia, Forum Koordinasi dan Konsultasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, 26 Juli 2005.

- Melfa Octaviana, “Upaya Hukum Pemerintah Kota Jambi Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.
- Muh. Iqbal Maulana, “Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Trotoar Jalan”, Tesis, Program Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Sjachran Basah, “*Pencabutan Izin Salah Satu Hukum Administrasi*” (Makalah pada Penataran Hukum Adminisrasi dan lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1995.
- Teori kebijakan Publik menurut Para ahli, [https://idtesis.com/teori-kebijakan – publik-menurut-para-ahli/~kebijakan%20publik%20merupakan %20 suatu%20aturan,ada%20berkembang%20di%20masyarakat](https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/~kebijakan%20publik%20merupakan%20suatu%20aturan,ada%20berkembang%20di%20masyarakat). Diakses pada tanggal 15 September 2022.
- Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.